



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI SELASA, 18 AGUSTUS 2026

RINGKASAN BERITA HARI INI



Ketua H. Abdillah Nasih, Wakil Ketua Suyarno, S.H., M.H., Wakil Ketua H. Kayan, S.H., Wakil Ketua Warih Andono, S.E.



12 SELASA, 18 AGUSTUS 2026 | SURYA

Bupati Subandi Ajak Masyarakat Jaga Kebersamaan

► Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Sidoarjo
Momentum Tingkatkan Pelayanan Publik



SURYA M. TUFAN

POTONG TUMPENG - Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana saat potong tumpeng di Pendopo Sidoarjo, Senin (17/8). Kegiatan itu digelar setelah upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Pastikan Program Unggulan Berjalan

PERINGATAN HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga menjadi momentum bagi masyarakat bersama pemerintah untuk terus menjaga kondusivitas, guyub, dan rukun agar pembangunan serta peningkatan kesejahteraan dapat berjalan optimal.

Menurut Bupati Sidoarjo Subandi pembangunan infrastruktur terus dilakukan Pemkab Sidoarjo. Program itu masuk dalam 14 program prioritas pemerintahan Subandi-Mimik Idayana.

Pembangunan infrastruktur yang sedang masif di Sidoarjo, antara lain adalah betonisasi jalan di sejumlah wilayah. Seperti yang sedang berjalan di Bluru Kidul, di kawasan Pabean hingga Ndares, dan sebagainya. "Ketika infrastruktur kita meningkat, tentu perekonomian juga meningkat," katanya.

Subandi juga menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo dalam memberikan akses kesehatan melalui

SIDOARJO, SURYA - Bupati Sidoarjo Subandi mengajak seluruh lapisan masyarakat menjadikan momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus mempererat rasa kebersamaan. Hal tersebut disampaikan Bupati Subandi usai memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Alun-alun Sidoarjo, Senin (17/8).

Bupati Subandi mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga semangat persatuan dan kesatuan sebagai bagian penting dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. "Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga kerukunan dan mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata serta pengabdian yang terbaik," ujar Subandi.

Menurutnya, semangat kemerdekaan



SURYA M. TUFAN

DPRD KABUPATEN SIDOARJO

Prioritaskan Belanja Daerah untuk Kebutuhan Mendesak

DPRD Kabupaten Sidoarjo
Menyepakati Perubahan
KUA-PPAS 2026

SIDOARJO - DPRD Kabupaten Sidoarjo menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Sabtu (15/8), setelah pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Juru Bicara Banggar DPRD Sidoarjo



DOKUMENTASI KOMINFO KABUPATEN SIDOARJO

DISUSUN SECARA CERMAT: Bupati Sidoarjo Subandi (kiri) dan Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih (dua dari kiri) menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna di Sidoarjo, Sabtu (15/8).

Kebakaran di Salah Satu Cluster di Kahuripan Nirwana

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Warga Cluster Garderia Kahuripan Nirwana, Sidoarjo, dikejutkan kebakaran yang melanda sebuah rumah usaha pada Minggu (16/8) dini hari. Api membakar bangunan berukuran sekitar 16 x 12 meter tersebut hingga petugas pemadam kebakaran (damkar) turun tangan.

Humas Damkar BPBD Sidoarjo Yoli Wisnu mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 02.10. Laporan diterima petugas melalui Call Center 112 pada pukul 02.19. "Setelah menerima laporan, kami langsung menerjunkan tiga unit mobil PMK ke lokasi untuk melakukan pemadaman," ujar Yoli Wisnu.

Tiga unit tersebut berasal dari PMK Unit Kota, PMK Unit Sukodono, dan PMK Unit Buduran. Petugas kemudian berjibaku memadamkan api agar tidak semakin meluas ke

bangunan di sekitar lokasi.

Proses pemadaman berlangsung hingga sekitar pukul 03.35. Beruntung, dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka. "Untuk korban jiwa maupun luka nihil. Kendala di lapangan juga tidak ada," jelasnya.

Yoli menambahkan, objek yang terbakar merupakan rumah usaha milik Dadang. Luas bangunan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 16 x 12 meter.

Sementara itu, penyebab kebakaran hingga kini masih belum diketahui. Begitu pula dengan total kerugian materiil akibat kejadian tersebut masih dalam pendataan. Petugas Damkar BPBD Sidoarjo memastikan penanganan kebakaran telah selesai dilakukan dan situasi di lokasi telah terkendali. (cat/rus)



Damkar BPBD Sidoarjo memadamkan api di Cluster Garderia Kahuripan Nirwana, Sidoarjo.

CS Dipinda dengan CamScanner



AM/LUSTRASI

DOORTO DOOR: Petugas Sensus Ekonomi mendata warga.

Takut Dipajaki, Warga Enggan Didata Petugas Sensus Ekonomi

KOTA-Kekhawatiran bakal dikenai pajak hingga dugaan pajak naik masih menjadi salah satu hambatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo dalam menuntaskan Sensus Ekonomi 2026. Sejumlah warga bahkan memilih tidak membuka pintu atau enggan memberikan keterangan kepada petugas yang datang mela-

kukan pendataan.

Padahal, waktu pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tinggal 15 hari lagi sebelum ditutup pada 31 Agustus 2026.

Kepala BPS Kabupaten Sidoarjo Bagyo Trilaksono mengatakan, petugas masih menemukan berbagai kendala ketika melakukan pendataan kegiatan ekonomi di lapangan.

● **Ke Halaman 10**

CS Dipindai dengan CamScanner

Takut Dipajaki,...

Selain kekhawatiran soal pajak, ada pula warga yang memang enggan di data dengan berbagai alasan.

“Tidak sedikit warga yang enggan memberikan keterangan ketika petugas datang ke lokasi. Alasannya cukup beragam. Ada yang takut kena pajak,

takut pajaknya naik, ada yang tidak mau buka pintu, enggan didata dan lain-lain,” ujar Bagyo, Senin (17/8).

Menurutnya, petugas terus melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia memberikan data yang dibutuhkan. Pendataan dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai berbagai kegiatan ekonomi yang

berlangsung di Sidoarjo.

Kendala serupa juga ditemui saat petugas mendata perusahaan. Tidak sedikit perusahaan yang meminta petugas menunggu persetujuan dari pimpinan maupun kantor pusat sebelum data dapat diberikan. “Kami diminta izin dulu ke kantor pusatnya, baru diberi datanya,” jelasnya.

Selain itu, terdapat perusahaan yang memilih mengisi data secara mandiri setelah didatangi petugas. Namun, hingga kini sebagian data tersebut belum diselesaikan maupun dikembalikan kepada petugas.

“Kami terus mendorong. Petugas kami melakukan penelusuran untuk melengkapi data yang belum masuk,” tegas Bagyo.

Meski menghadapi berbagai kendala, progres pendataan kegiatan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo saat ini telah mencapai sekitar 80 persen. BPS mencatat terdapat kurang lebih 120 ribu kegiatan ekonomi yang menjadi sasaran pendataan.

Dari jumlah tersebut, sektor perdagangan, restoran dan warung makan, serta industri menjadi kegiatan ekonomi yang paling dominan. Ketiga sektor tersebut diperkirakan mencapai sekitar 60 persen dari keseluruhan kegiatan ekonomi yang telah terdata.

BPS Sidoarjo pun masih terus mengejar data yang belum masuk, baik dari masyarakat maupun perusahaan. Petugas akan melakukan penelusuran dan pendekatan hingga seluruh kegiatan ekonomi yang menjadi sasaran Sensus Ekonomi 2026 dapat tercatat. Pendataan akan terus disebut hingga batas akhir pelaksanaan pada 31 Agustus mendatang. **(dik/vga)**



Anggota Pramuka di SMP PGRI 1 Buduran, ikut lomba membuat layang-layang, ketika peringatan HUT Pramuka 2026. alikus/bhirawa

Tanam Sayur, Pramuka SMP PGRI 1 Buduran Diminta Jaga Ketahanan Pangan

Sidoarjo, Bhirawa

Dewan Penggalang dan Pembina, upacara Hari Pramuka 2026, SMP PGRI 1 Buduran, Siti Tri Mudayana, menyampaikan 2 pesan penting terkait ketahanan pangan kepada adik-adik Pramuka penggalang di Pangkalan SMP PGRI 1 Buduran tersebut Pertama, area lingkungan sekolah agar ditanami dengan tanaman yang menunjang ketahanan pangan. Di antaranya, tomat, terong, dan buah-buahan.

Kedua, adik-adik Pramuka juga agar menghormati makanan yang didapat, seperti dari paket MBG atau Makan Bergizi Gratis, yang setiap hari bisa dinikmati di sekolah. "Jangan sampai dibuang, ya, nikmati, karena itu untuk kesehatan kalian sendiri," ujar Siti. Upacara Peringatan Hari Pramuka 2026 di SMP PGRI 1 Buduran tersebut dilakukan di halaman sekolah. Hadir pada upacara tersebut Kamabigus SMP PGRI 1 Buduran, Indrajayanti Ratnaningsih dan Ketua Sanggar Pramuka Pangkalan SMP PGRI 1 Buduran, Siti Nur Ifa.

Upacara diikuti oleh adik-adik Pramuka penggalang Pangkalan SMP PGRI 1 Buduran kelas VII dan VIII, para pembina Pramuka Pangkalan SMP PGRI 1 Buduran dan para guru dan tenaga kependidikan. Siti Tri Mudayana menjelaskan kenapa dirinya berpesan agar halaman SMP PGRI 1 Buduran ditanami sayur mayur. [kus.wwn]

CS diunduh dengan CamScanner

Sound Horeg Tak Dilarang, Pemkab Hanya Berikan Batasan

Wajib Berizin

KOTA-Pemkab Sidoarjo resmi menerbitkan aturan penggunaan sound system atau pengeras suara di tengah maraknya kegiatan yang menggunakan sound horeg.

Melalui Surat Edaran (SE) Bupati Sidoarjo Nomor 000/2/438.6.5/2026, pemerintah tidak melarang penggunaan sound system, tetapi memberikan batasan tegas terkait tingkat kebisingan, kendaraan pengangkut, waktu, tempat, hingga rute penggunaannya.

SE yang ditandatangani Bupati Sidoarjo Subandi pada 9 Agustus 2026 itu menjadi pedoman bagi masyarakat, penyelenggara kegiatan, pengusaha persewaan sound system, maupun Event Organizer (EO) agar penggunaan pengeras suara tidak mengganggu ketertiban umum maupun menimbulkan dampak sosial.

Salah satu poin utama yang diatur adalah batas tingkat kebisingan. Untuk sound system statis atau berada di lokasi yang telah ditentukan, seperti kegiatan kenegaraan, pertunjukan



HIBURAN: Ilustrasi sound horeg di Sidoarjo.

musik, seni, dan budaya, batas maksimal yang diperbolehkan mencapai 120 dBA.

Sementara itu, untuk penggunaan sound system dalam kegiatan

tan karnaval, penyampaian pendapat di muka umum, serta kegiatan lain yang bersifat nonstatis atau berpindah tempat, batas maksimal ditetapkan 85 dBA.

"Penggunaan sound system/pengeras suara statis/di tempat yang telah ditentukan pada kegiatan kenegaraan, pertunjukan

• Ke Halaman 10

CS

RADAR
SIDOARJO.ID

Sound Horeg...

musik, seni dan budaya pada ruang terbuka dan tertutup maksimal 120 dBA," demikian bunyi SE Bupati Sidoarjo.

Aturan tersebut mengacu pada sejumlah ketentuan mengenai kesehatan lingkungan dan baku tingkat kebisingan yang berlaku.

Selain suara, Pemkab Sidoarjo juga mengatur kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sound system. Kendaraan pengangkut wajib me-

enuhi uji kelayakan kendaraan atau KIR, sehingga aspek keselamatan di jalan tetap menjadi perhatian.

Pengaturan juga berlaku terhadap waktu, tempat, dan rute perjalanan. Sound system untuk kegiatan karnaval maupun kegiatan nonstatis lainnya wajib dimatikan ketika melintasi tempat ibadah saat berlangsung peribadatan, kegiatan budaya masyarakat, pengajian umum, prosesi pemakaman, rumah sakit, ambulans yang sedang membawa orang sakit, serta lingkungan pendidikan ketika kegiatan

pembelajaran berlangsung.

Tak hanya itu, sound system juga tidak boleh dibunyikan selama perjalanan dari tempat pengusaha atau pelaku bisnis persewaan menuju lokasi kegiatan yang telah mendapatkan izin.

Pemkab Sidoarjo turut menegaskan bahwa penggunaan sound system untuk kegiatan masyarakat tidak boleh menjadi sarana munculnya pelanggaran hukum.

Kegiatan dilarang disertai minuman keras, narkoba, pornoaksi, pornografi, kepemilikan senjata tajam, mau-

pun barang terlarang lainnya.

Penyelenggara juga diwajibkan menjaga ketertiban, kerukunan, lingkungan, serta tidak melakukan kegiatan yang dapat memicu konflik sosial atau merusak fasilitas umum dan properti masyarakat.

Dalam SE tersebut, pengusaha persewaan sound system dan/atau EO juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan batasan kepada masyarakat atau penyewa agar mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan.

Urusan perizinan juga menjadi syarat

penting. Penyelenggara kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, termasuk kegiatan yang menggunakan sound system, wajib memperoleh izin keramaian dari kepolisian.

"Penggunaan sound system atau pengeras suara dengan intensitas suara melebihi batas wajar berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum, dampak sosial dan kesusilaan, membahayakan kesehatan masyarakat, serta dapat merusak fasilitas umum dan/atau properti milik masyarakat," tulis Subandi dalam SE tersebut. (dik/vga)

RADAR
SIDOARJO.ID



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tak Pasang Merah Putih, Pegawai BPP Porong Ditegur

SIDOARJO – Pegawai Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Porong mendapat sorotan karena sama sekali tak memasang atribut Agustusan, termasuk bendera hingga kemarin (17/8). Mereka baru memasang bendera di kantor pemerintahan setelah ditegur.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta) Sidoarjo Eni Rustianingsih mengaku kaget setelah mendapat informasi adanya kantor

pelayanan yang tidak memasang bendera. Sebab, imbauan pemasangan bendera di kantor-kantor pemerintahan telah disampaikan sejak awal Agustus. "Setelah ada laporan, teman-teman langsung saya ingatkan untuk memasang," kata kemarin (17/8).

Koordinator Penyuluhan Pertanian Dispaperta Sidoarjo Esty Ratna Kusumastuti meminta maaf terkait hal itu. Bendera dipasang setelah ada teguran. "Kami mohon maaf



Setelah ada laporan, teman-teman langsung saya ingatkan untuk memasang."

Eni Rustianingsih

Kepala Dispaperta Sidoarjo

yang sebesar-besarnya dan terima kasih masukannya," ujarnya. (ful/hen)

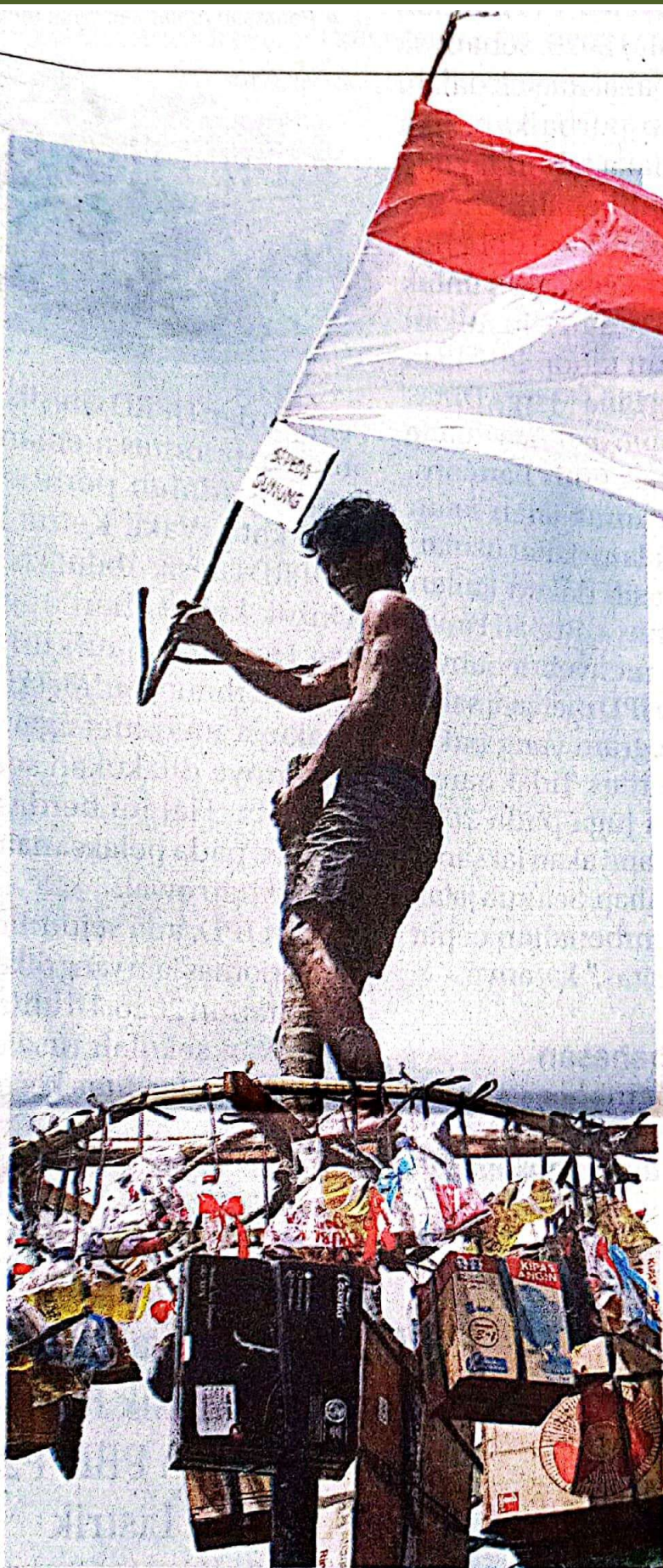
CS | dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ANGGER BONDAN/JAWA POS

Warga Sawotratap Rayakan HUT Kemerdekaan dengan Basah-basahan

PERAYAAN HUT
Ke- 81 Kemerdekaan
RI oleh warga RT 07/
RW 12, Desa Sawotra-
tap, Gedangan, di-
pusatkan di Kali Pager.
Sungai itu dibersihkan
untuk lomba basah-
basahan. Selain panjat
pinang, warga juga
menggelar lomba
memancing dan
perang bantal. (*)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos

HUT RI, Bupati Ajak Warga Isi Kemerdekaan dengan Kerja Nyata

KOTA-Semangat kemerdekaan di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya dirayakan dengan upacara, tetapi juga diwujudkan melalui kerja nyata, pengabdian, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi saat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-alun Sidoarjo, Senin (17/8).

Dalam amanatnya, Subandi mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal penting dalam mempertahankan sekaligus mengisi kemerdekaan.

Menurutnya, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kontribusi positif seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pun berkomitmen mendukung



KOMPAK: Bupati Sidoarjo Subandi bersama Wabup Mimik Idayana usai upacara bendera di Alun-alun Sidoarjo, Senin (17/8).

pembangunan nasional demi mewujudkan masa depan bangsa yang sama-

kin maju dan masyarakat yang lebih sejahtera.

"Dari Sidoarjo, kami siap

mendukung pembangunan nasional demi masa depan bangsa yang lebih maju dan

sejahtera," tegas Subandi.

Ia juga mengajak masyarakat memantapkan langkah bersama menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Momentum HUT Kemerdekaan, lanjutnya, harus menjadi pengingat untuk terus memperkuat kerukunan dan meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga kerukunan dan mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata serta pengabdian yang terbaik," ujarnya.

Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Sidoarjo juga diwarnai dengan penyerahan remisi kepada perwakilan warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas).

● Ke Halaman 10

CS



HUT RI, Bupati Ajak...

Pemberian remisi menjadi bagian dari peringatan kemerdekaan sekaligus bentuk apresiasi atas proses pembinaan dan perubahan perilaku warga binaan selama menjalani masa pidana.

Penyerahan remisi tersebut diharapkan menjadi momentum bagi warga bi-

naa untuk terus memperbaiki diri, mengikuti pembinaan dengan baik, serta mempersiapkan diri agar dapat kembali dan diterima di tengah masyarakat.

Kado istimewa juga diterima Polresta Sidoarjo dalam rangkaian Resepsi Kenegaraan. Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) memberikan penghargaan atas inovasi pelayanan

Surat Izin Mengemudi (SIM) selama 24 jam nonstop yang dilaksanakan selama 17 hari. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi terhadap inovasi pelayanan publik Polresta Sidoarjo dalam memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Sidoarjo akhirnya

tidak sekadar menjadi seremoni tahunan. Momentum tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengajak seluruh elemen masyarakat berkontribusi dalam pembangunan daerah, bangsa, dan negara.

Upacara berlangsung khidmat.

Hadir Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati, Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo Sriatun Subandi, jajaran Forkopimda Sidoarjo, sejumlah pejabat, serta perwakilan masyarakat dari berbagai elemen. (dik/vga)

CS



Jabatan Itu Amanah

KEPADA 254 orang Kepala Sekolah SD dan SMP, yang dilantik, Bupati Sidoarjo Subandi memberikan amanat tegas, bahwa jabatan yang diberikan adalah amanah besar.

Mereka harus bisa memastikan tidak ada lagi anak di Kabupaten Sidoarjo yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Semua anak harus mendapat kesempatan untuk berkembang. Itu mendukung program prioritas Pemkab Sidoarjo. Salah satunya adalah program 20.000 beasiswa pendidikan.

T u -
g a s
dari
B u -
p a t i
S i d o -
a r j o i t u , j u g a

►► ke halaman 11

Subandi

Jabatan Itu Amanah

● Sambungan hal 1

disampaikan dihadapan para pejabat di lingkungan Dikbud Kabupaten Sidoarjo, saat acara pelatihan kepala sekolah yang digelar di pendopo Delta Wibawa Sidoarjo tersebut.

Dipercaya menjadi seorang kepala sekolah, para Kepala sekolah yang dilantik, diingatkan Bupati Subandi, harus mampu memegang teguh tanggung jawab memimpin satuan pendidikan. Dengan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sidoarjo.

“Saya ingatkan sekali lagi, jabatan kepala sekolah bukanlah tempat mencari

pangkat dan jabatan, melainkan ruang untuk menunjukkan kinerja terbaik, memberikan manfaat nyata bagi pembangunan SDM di kabupaten Sidoarjo,” komentarnya, Kamis (12/8) kemarin

Membangun SDM dari sekolah, kata Subandi, merupakan bagian penting dari pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Karena sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2025–2030. Yakni menata desa, membangun kota. Menuju Sidoarjo Metropolitan Inklusif, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan.

Dari sekolah yang maju, lanjut Subandi, akan bisa lahir kepemimpinan

yang mampu menggerakkan. Maka para guru harus bisa memastikan setiap anak mendapat pendidikan bermutu, serta membangun lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak-anak didiknya.

Diingatkan juga agar tidak ada kepala sekolah di Kabupaten Sidoarjo yang tersangkut kasus hukum, akibat buruknya pelaksanaan program revitalisasi di sekolahnya.

Subandi berpesan agar kepala sekolah meminta pendampingan dari Inpektorat Kabupaten Sidoarjo dala menjalankan program swakelola tersebut.

Data dari Dikbud Sidoarjo, dari 254

kepala sekolah yang dilantik, 90 kepala sekolah SD negeri merupakan jabatan hasil promosi. Sisanya hanya bergeser te mpat saja.

Sedangkan jabatan promosi kepala sekolah SMP negeri diisi sebanyak 12 orang. Sisanya hanya mutasi ke SMP negeri lain, yaitu sebanyak 15 orang. Ditegaskan, pengisian jabatan kepala sekolah ini bebas dari titipan.

Dinyakini 100 persen tidak ada gratifikasi. Jika suatu saat diketahui ada gratifikasi dalam pengisian jabatan kepala sekolah, sanksinya tegas. Yaitu, diberhentikan dari aparatur sipil negara (ASN) dan sebagai guru. [kus.gat]



DPRD KABUPATEN SIDOARJO

Prioritaskan Belanja Daerah untuk Kebutuhan Mendesak

DPRD Kabupaten Sidoarjo Menyetujui Perubahan KUA-PPAS 2026

SIDOARJO - DPRD Kabupaten Sidoarjo menyetujui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Sabtu (15/8), setelah pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Juru Bicara Banggar DPRD Sidoarjo Kusumo Adi Nugroho mengatakan, pembahasan perubahan KUA-PPAS dilakukan dengan melihat kondisi keuangan daerah sekaligus kebutuhan pembangunan. Anggaran yang disusun harus tetap mengikuti arah pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RKPD 2026. Karena itu, DPRD meminta program yang masuk dalam perubahan anggaran benar-benar memiliki prioritas yang jelas.

"Skala prioritas harus disesuaikan dengan lima target prioritas pembangunan dalam RKPD 2026, sehingga arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai," katanya saat menyampaikan laporan Banggar dalam rapat paripurna.

Dalam perubahan KUA-PPAS tersebut, pendapatan daerah mengalami penyesuaian. Pendapatan yang sebelumnya diproyeksikan Rp 5,040 triliun menjadi Rp 4,956 triliun. Artinya turun sebesar Rp 83,44 miliar atau sekitar 1,66 persen. Banggar meminta target pendapatan disusun secara realistis dengan melihat potensi dan capaian sampai semester berjalan.

Penyesuaian juga terjadi pada sisi belanja daerah. Anggaran belanja yang sebelumnya mencapai Rp 5,716 triliun menjadi Rp 5,613 triliun atau turun Rp 102,78 miliar, sekitar 1,80 persen. Sementara pembiayaan daerah turun dari Rp 675,71 miliar menjadi Rp 656,36 miliar atau berkurang Rp 19,34 miliar.

Kusumo menyampaikan, penurunan anggaran tersebut membuat Pemkab harus semakin cermat menentukan program yang akan dijalankan. Belanja



DOKUMENTASI KOMINFO KABUPATEN SIDOARJO

DISUSUN SECARA CERMAT: Bupati Sidoarjo Subandi (kiri) dan Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih (dua dari kiri) menyetujui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna di Sidoarjo, Sabtu (15/8).

daerah diminta diarahkan pada kegiatan yang memang dibutuhkan masyarakat dan mendukung target pembangunan. "Program yang tidak mendesak perlu dievaluasi agar anggaran yang tersedia bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting," ujarnya.

Perhatian juga diberikan pada belanja modal. Dia mendorong agar anggaran lebih banyak diarahkan untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang kondisinya rusak atau membutuhkan penanganan segera. Fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, drainase, pengendalian banjir, hingga sarana pelayanan publik menjadi beberapa sektor yang mendapat perhatian.

Selain alokasi anggaran, Kusumo meminta Pemkab memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program. Setiap perubahan alokasi kegiatan harus didukung data yang valid dan sesuai kebutuhan di lapangan. "Monitoring harus dilakukan secara berkala, mulai proses pengadaan, kontrak, progres pekerjaan, hingga pembayaran," kata Kusumo.

Kusumo menegaskan, perubahan APBD bukan sekadar mengubah angka dalam dokumen anggaran. Pelaksanaannya harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga agar program prioritas tidak tertunda. Karena itu, seluruh rekomendasi Banggar bersama TAPD diminta ditindaklanjuti dalam penyusunan Perubahan APBD 2026.

Siap Kawal Seluruh Program

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih menyebut, kesepakatan perubahan KUA-PPAS menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan tetap berjalan di tengah penyesuaian kemampuan keuangan daerah. DPRD bersama pemerintah daerah perlu menjaga agar anggaran yang tersedia digunakan secara tepat. Terutama untuk program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

Menurut Nasih, pembahasan bersama antara DPRD dan Pemkab diperlukan agar perubahan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan. Setiap program harus dilihat manfaatnya dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. "Kami ingin seluruh program yang sudah menjadi prioritas benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sidoarjo, karena itu rekomendasi Banggar akan kami kawal agar dapat ditindaklanjuti dalam perubahan APBD," terangnya.

Setelah kesepakatan perubahan KUA-PPAS ditandatangani, Pemkab Sidoarjo diminta segera menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. DPRD selanjutnya akan melanjutkan pembahasan sesuai tahapan yang berlaku. Dengan proses tersebut, perubahan anggaran diharapkan tetap berjalan sesuai kemampuan fiskal sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan Kota Delta. (ful/xav)

CS Berdaptasi dari Kompas.com

Jawa Pos

Gelar Renungan Suci dan Malam Tirakatan

SEBELUM Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang digelar di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, beberapa rangkaian acara penting juga dihelat untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan.

Apel kehormatan dan renungan suci (AKRS) digelar di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Sidoarjo, Senin (17/8) dini hari. Acara itu digelar sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur berjuang merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Di TMP Sidoarjo bersemayam 1.195 pahlawan bangsa yang gugur demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada 793 anggota TNI, 127 anggota Polri, 5 pegawai sipil serta 270 pahlawan tak dikenal disemayamkan di sana.

Acara sakral itu diisi dengan prosesi penyalaan obor dan lilin di setiap pusara makam. Nyala api itu sebagai simbol semangat perjuangan para pahlawan yang tak pernah padam. Semangat itu yang akan tetap menyala di dalam jiwa dan raga setiap generasi penerus bangsa.

Apel dipimpin Komandan Lanudal Juanda Kolonel Laut (P) Henoeh Nasarius Virzawan. Hadir dalam momen sakral itu Bupati Sidoarjo Subandi, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Abraham Prihadi, dan Kepala OPD Sidoarjo.

"Kami bersumpah dan berjanji bahwa perjuangan para pahlawan adalah perjuangan kami juga, dan jalan kebaktian yang para pahlawan tempuh adalah jalan bagi kami juga," kata Kolonel Laut (P) Henoeh Nasarius Virzawan saat menjadi



SURYA/M. TAUFIK

APEL KEHORMATAN - Para pejabat di Sidoarjo usai mengikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Sidoarjo, Senin (17/8) dinihari.

inspektur upacara.

Sebelumnya, Pemkab Sidoarjo juga menggelar malam tirakatan di Pendopo Delta Wibawa, Minggu (16/08) malam. Para pejabat dan *stakeholder* hadir dalam acara itu. Termasuk para tokoh agama, seperti KH Raden Abdussalam Mujib, KH Abdul Azis Munif, KH Wahid Harun, KH Nur Cholis Misbah, dan Ketua MUI Sidoarjo KH Ahmad Muhammad.

Dalam kesempatan itu, Bupati Subandi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memaknai kemerdekaan secara komprehensif. Memastikan bahwa kemerdekaan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Sidoarjo.

Bupati juga menekankan pentingnya dukungan terhadap visi dan misi presiden, dengan harapan tercipta akselerasi yang harmonis antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. "Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini

memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Kita bisa berkumpul bersama dalam momen yang penuh makna ini, saling memberikan dukungan antar pemangku kepentingan," ujarnya.

Ketika pimpinan daerah, *stakeholder*, tokoh agama, dan elemen-elemen lain secara bersama-sama mendukung pembangunan maka akan terwujud pemerintahan yang maju. Dan, Sidoarjo bisa menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur.

Mantan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso yang juga hadir dalam kesempatan itu sempat mengapresiasi malam tirakatan ini. Ia juga menyampaikan harapan agar di bawah kepemimpinan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana, Sidoarjo dapat mencapai kemajuan lebih pesat, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan guna memberikan pelayanan optimal ke masyarakat. (ufi)



12 SELASA, 18 AGUSTUS 2026 | SURYA

Bupati Subandi Ajak Masyarakat Jaga Kebersamaan

► Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Sidoarjo
Momentum Tingkatkan Pelayanan Publik



POTONG TUMPENG - Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana saat potong tumpeng di Pendopo Sidoarjo, Senin (17/8). Kegiatan itu digelar setelah upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Pastikan Program Unggulan Berjalan

PERINGATAN HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga menjadi momentum bagi masyarakat bersama pemerintah untuk terus menjaga kondusivitas, gubuh, dan rukun agar pembangunan serta peningkatan kesejahteraan dapat berjalan optimal.

Menurut Bupati Sidoarjo Subandi pembangunan infrastruktur terus dilakukan Pemkab Sidoarjo. Program itu masuk dalam 14 program prioritas pemerintahan Subandi-Mimik Idayana.

Pembangunan infrastruktur yang sedang masif di Sidoarjo, antara lain adalah betonisasi jalan di sejumlah wilayah. Seperti yang sedang berjalan di Eluru Kidul, di kawasan Pabean hingga Ndares, dan sebagainya. "Ketika infrastruktur kita meningkat, tentu perekonomian juga meningkat," katanya.

Subandi juga menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo dalam memberikan akses kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC). "Para camat dan kepala desa, kalau ada warganya yang tidak punya BPJS, apalagi tidak mampu, kami perintahkan segera terbitkan SKTM dan segera dibikinkan BPJS," tegas Subandi.

Pihaknya juga mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik mulai tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Upaya itu untuk mempermudah pelayanan sekaligus meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi ~~keberkasan~~. Program-program prioritas lainnya, semua juga sudah berjalan, terkait tenaga kerja misalnya, selama ini Pemkab Sidoarjo terus membuka bursa kerja dan menggelar berbagai pelatihan untuk masyarakat," ungkap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Bahrul Amig.

Program prioritas lainnya, menurut Amig, makan bergizi gratis untuk warga miskin dan lansia sudah berjalan. Pemberian beasiswa juga terus digelontor setiap tahun. Kemudian pemberian modal usaha untuk pelaku UMKM selama ini juga terus mengalir lewat Bank Delta Aria.

"UMKM naik kelas, terus kita jalankan programnya. Demikian juga bedah warung dan beberapa program lainnya. Kemudian revitalisasi taman kota, jelas sudah kita rasakan Alun-alun yang baru. Untuk anak muda, ada pembangunan sirkuit balap yang sudah kita siapkan, serta beberapa program pelatihan kreativitas digital, AI, dan beberapa program lain," urainya. (ufi)



KOMPAK - Bupati Sidoarjo, Wakil Bupati Sidoarjo, Ketua DPRD Sidoarjo, Dandim Sidoarjo, Kapolresta Sidoarjo, dan sejumlah pejabat saat berjalan bersama menuju alun-alun Sidoarjo untuk mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Senin (17/8).

STORY HIGHLIGHTS

- Bupati Subandi mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga semangat persatuan dan kesatuan sebagai bagian penting dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan.
- Tekankan pentingnya menjaga kondusivitas, semangat gubuh dan rukun antara masyarakat dan pemerintah guna menyokong keberlanjutan pembangunan daerah.
- Stabilitas dan kerukunan warga jadi fondasi utama agar program strategis Pemkab Sidoarjo, seperti akselerasi infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan, dapat berjalan optimal.
- Dalam rangkaian Resepsi Kenegaraan juga diberikan penghargaan MURI ke Polresta Sidoarjo atas inovasi pelayanan SIM 24 jam nonstop selama 17 hari.

lis tersebut diharapkan menjadi momentum bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, mengikuti proses pembinaan dengan baik, serta mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat.

Dalam rangkaian Resepsi Kenegaraan juga diberikan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) kepada Polresta Sidoarjo atas inovasi pelayanan surat izin mengemudi (SIM) selama 24 jam nonstop yang dilaksanakan selama 17 hari.

Penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap inovasi pelayanan publik yang dilakukan Polresta Sidoarjo dalam memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Sidoarjo pun menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah. (ufi)

Usai pelaksanaan upacara bendera, rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Sidoarjo, dilanjutkan dengan Resepsi Kenegaraan yang digelar di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo. Di sela kegiatan itu, bupati secara simbolis menyerahkan remisi kepada perw-

kilang warga binaan pemasyarakatan. Pemberian remisi ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus bentuk apresiasi atas pembinaan dan perubahan perilaku warga binaan selama menjalani masa pidana. Penyerahan remisi secara simbo-

CS Dipindai dengan CamScanner

SURYA



SURYA/M TAUFIK

PENGHARGAAN - Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo berfoto bersama para pimpinan instansi terkait usai penyerahan penghargaan di sela Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Senin (17/8).

Penghargaan untuk Stakeholder

UPACARA peringatan HUT ke-81 RI di Alun-alun Sidoarjo berjalan khidmad. Para pejabat dan berbagai *stakeholder* ikut hadir dalam upacara yang dipimpin oleh Bupati Sidoarjo Subandi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Pemkab Sidoarjo juga memberikan sejumlah penghargaan kepada beberapa instansi.

Bupati Sidoarjo Subandi bersama Wakil Bupati Mimik Idayana menyerahkan penghargaan kepada Polresta Sidoarjo dalam peningkatan layanan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Yakni layanan melalui program pelayanan terpadu satu atap pada proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Bupati dan Wakil Bupati juga menyerahkan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dalam peningkatan layanan masyarakat pada

program pendampingan hukum dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Penghargaan juga diberikan kepada Kodim 0816 Sidoarjo dalam peningkatan layanan masyarakat melalui program sinergi dan dukungan untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Kemudian penghargaan kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam peningkatan layanan masyarakat melalui program komitmen mendukung pelayanan peradilan yang cepat transparan dan berkeadilan bagi masyarakat.

Bupati dan Wabup juga menyerahkan penghargaan untuk BNN Sidoarjo dalam peningkatan layanan masyarakat melalui program dedikasi dan kolaborasi untuk mewujudkan Sidoarjo bersih dari peredaran narkoba. (ufl)



SURYA / M. TAUFIK

MACET - Kondisi perempatan Gedangan yang kerap macet. Di lokasi tersebut bakal dibangun flyover atau jembatan layang untuk mengurangi kemacetan yang menjadi langganan.

► Flyover Gedangan Selangkah Menuju Appraisal

SIDOARJO, SURYA - Pembangunan Flyover Gedangan dirancang sepanjang 447 meter dengan lebar 18 meter. Lebar lajur masing-masing 3,5 meter. Jembatan layang ini dibangun guna mengurai titik kemacetan kronis di perempatan Gedangan. Total kebutuhan lahan mencapai 23.169 m² di sisi timur kawasan itu.

Untuk membebaskan lahan di area strategis itu, Pemkab Sidoarjo menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp 450 miliar dengan skema multiyears. Alokasinya sebesar Rp 200 miliar pada APBD 2026, serta Rp 250 miliar pada APBD 2027 dengan rincian Rp 200 miliar untuk pelunasan lahan dan Rp 50 miliar alokasi tambahan.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdilah Nasih, menyatakan pihaknya mendukung penuh pembangunan jembatan layang Gedangan. Sehingga dukungan untuk proses pengalokasian anggaran juga bakal terus dikawal.

"Dewan selalu menyetujui pengalokasian dana untuk pembangunan Flyover Gedangan. Sejauh ini tidak pernah ada masalah," kata Nasih.

Termasuk dalam rencana pengalokasian anggaran untuk tahun depan, politi-

si PKB itu juga menyatakan bahwa pihaknya bakal menyetujui semua anggaran sesuai kebutuhan.

"Pasti kita dukung dan penuhi kebutuhannya. Kami di dewan sudah sepakat dengan eksekutif bahwa proyek ini harus segera rampung," tandasnya.

Alokasi dana lewat APBD Sidoarjo dibutuhkan untuk pembebasan lahan di sana. Sementara proses pembangunan fisiknya, nanti akan didanai dan dibangun langsung oleh pemerintah pusat. Rencananya, flyover Gedangan bakal mulai dibangun tahun depan.

Tahapan penting

Rencana pembangunan Flyover Gedangan mulai memasuki tahapan penting. Sebanyak 122 bidang tanah terdampak proyek telah diajukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diverifikasi.

Tahapan ini menjadi pintu menuju proses appraisal atau penaksiran harga tanah. Pemkab Sidoarjo memastikan pembebasan lahan berjalan lancar, meski sebelumnya terdapat sejumlah persoalan administrasi, pemilik lahan yang sulit dihubungi hingga pembagian waris.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amig menyampaikan, berbagai tahapan pembebasan lahan yang dijalankan Pemkab Sidoarjo berjalan lancar.

"Semua berjalan baik dan nyaris tidak ada kendala berat. Masyarakat mendukung rencana pembangunan ini," ujar Amig di Pendopo Sidoarjo, Senin (17/8).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo M Makhmud menyebutkan, total terdapat 122 bidang tanah yang diajukan ke BPN. Rinciannya terdiri atas 70 rumah usaha, 25 rumah toko (*ruko*), 12 tanah kosong/saluran/jalan, 8 rumah tinggal, 4 kantor, 2 rumah dinas, serta 1 tempat ibadah.

"Pengajuan peta bidang ke BPN targetnya selesai dalam 2-3 minggu ke depan. Pemetaan BPN ini menjadi prasyarat utama sebelum kami melangkah ke proses penaksiran harga (*appraisal*)," kata Makhmud.

Seluruh proses pembebasan tanah ditargetkan rampung tepat waktu agar pengerjaan fisik flyover dapat dimulai pada tahun 2027.

(ufi)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komisi B Mempercepat RDP Dengan PDAM Delta Tirta



Sidoarjo-cakrajatim.com: Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi B dengan PDAM Delta Tirta, begitu cepat setelah jajaran PDAM yang hadir tidak lengkap. Padahal rapat sangat penting. Yaitu sorotan tajam masyarakat akan Karyawan PDAM Delta Tirta berinisial AA, pecandu narkoba hanya disanksi SP2 oleh management Perumda Delta Tirta Sidoarjo. komisi B memanggil jajaran Direksi dan Dewas Perumda Delta Tirta untuk RDP. drg Anang Suhari Kembali Mengikuti Putaran Musancab PKB Tulangan Pengangguran Terbuka Menjadi Agenda Serius DPRD Sidoarjo Dengar pendapat yang digelar pada Rabu (12/8) berjalan beberapa saat saja. H.Bambang Pujiyanto ketua komisi B DPRD Sidoarjo, menunda pelaksanaan hearing karena beberapa pejabat penting tidak hadir. "Karena ketua Dewas Perumda Delta Tirta, Kabag Hukum dan Kabag Perekonomian tidak hadir, maka agenda hearing hari ini kita tunda," tutur Bambang singkat. Bambang Pujiyanto mengaku sengaja menutup lebih cepat pelaksanaan hearing, karena tidak mungkin akan ada solusi tanpa kehadiran ketua Dewas. "Kita ingin ada langkah tegas dari ketua Dewas soal masalah ini. Begitu juga dengan Kabag Hukum, yang bisa memberikan paparan hukum soal masalah ini. Jika keduanya tidak hadir, tentu rapat tidak akan maksimal. Kita akan agendakan lagi," ujar Bambang. Sebelumnya terungkap pegawai PDAM Delta Tirta berinisial AA sebagai pecandu narkoba, berawal dari hasil tes urin di Mapolresta Sidoarjo setelah laka tunggal. Hasilnya bersangkutan positif mengkonsumsi zat adiktif. Selanjutnya pihak kepolisian merujuk AA ke institusi penanganan adiksi komponen masyarakat Rumah Merah Putih untuk menjalani rehabilitasi, Setelah mengikuti 12 kali pertemuan, bersangkutan dinyatakan selesai menjalani rehabilitasi. Dia hanya disanksi SP 2, dan dipindah tugas ke kantor PDAM DC Waru. "Sanksinya berupa pemberian SP2. Kalau melakukan kesalahan lagi, baru di-SP3. Artinya diberhentikan sebagai karyawan PDAM," ujar staf PDAM. (hd)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

APBD 2026 Sidoarjo Turun, DPRD Ingatkan Pemkab Jangan Kejar Serapan Semata



Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – DPRD Kabupaten Sidoarjo bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Pantai & Kepulauan Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kabupaten Sidoarjo yang digelar di Gedung DPRD Sidoarjo, Sabtu (15/8/2026) sore. Rapat tersebut menjadi forum pengambilan keputusan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026. Sebanyak 34 anggota DPRD Sidoarjo hadir dalam rapat paripurna tersebut. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan Bupati Sidoarjo Subandi. Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo bersama Bupati Sidoarjo sedang menandatangani nota kesepakatan bersama atas Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS TA 2026, Sabtu (15/8/2026). Doc : Siska Prestiwati

Dalam rapat paripurna itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan tersebut menjadi bagian penting sebelum pemerintah daerah menyusun Rancangan Perubahan APBD 2026. Pemerintah Juru Bicara Banggar DPRD Sidoarjo, Kusumo Adi Nugroho, mengatakan perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi riil daerah. Menurutnya, anggaran pemerintah daerah harus bersifat dinamis dan mampu merespons perkembangan yang terjadi sepanjang tahun berjalan. “Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, pergeseran anggaran antarorganisasi, antarunit organisasi, antarprogram, antarkegiatan, antarsubkegiatan maupun antarsubkegiatan,” kata Kusumo saat menyampaikan laporan Banggar dalam rapat paripurna. Kusumo menjelaskan mekanisme perubahan APBD tersebut memiliki dasar hukum. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan anggaran juga dapat dilakukan ketika terdapat kondisi yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan. Termasuk ketika terjadi keadaan darurat maupun keadaan luar biasa. Pemkab Sidoarjo sendiri sebelumnya telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah perkembangan dan kebutuhan yang membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian. Pergeseran anggaran dilakukan antarorganisasi, unit organisasi, program, kegiatan, subkegiatan hingga jenis belanja. Banggar menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan APBD harus mampu mengikuti perkembangan daerah. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menyusun anggaran berdasarkan perencanaan awal, tetapi juga harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program sepanjang tahun. Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo dan Bupati Sidoarjo menunjukkan nota kesepakatan setelah menandatangani. Doc : Siska Prestiwati

Pemerintah Pusat & Daerah “ Karena itu, perubahan APBD 2026 dinilai menjadi momentum bagi DPRD dan Pemkab Sidoarjo untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran,” tuturnya. Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan setiap rupiah anggaran memiliki target kinerja yang jelas dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Perubahan anggaran juga harus memperhatikan kemampuan fiskal agar tidak menimbulkan beban baru yang tidak mampu ditanggung daerah. Dalam nota kesepakatan yang ditandatangani DPRD dan Bupati Sidoarjo, perubahan kebijakan anggaran mengungkap tema “Penguatan Pelayanan Dasar Inklusif melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Menuju Kemandirian Pangan dan Energi.” Tema tersebut menjadi arah dalam penyesuaian kebijakan anggaran 2026. Penguatan pelayanan dasar, infrastruktur serta ketahanan pangan dan energi ditempatkan sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah. Juri bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kusumo Adi Nugroho. Doc : Siska Prestiwati

Pemerintah Pendapatan Daerah Turun Dalam struktur perubahan APBD 2026, pendapatan daerah mengalami penurunan dibandingkan anggaran sebelum perubahan. Pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 5.040.318.361.985 berubah menjadi Rp 4.956.875.635.741. Dengan demikian, pendapatan daerah turun sebesar Rp 83.442.726.244 atau sekitar 1,66 persen. Penyesuaian tersebut membuat pemerintah daerah harus semakin cermat dalam menentukan program yang akan dibiayai. Banggar meminta target pendapatan disusun berdasarkan potensi yang benar-benar ada. Sebagai contoh, jika sebelumnya pemerintah daerah menetapkan target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 5.000.000.000,00, maka target tersebut harus disesuaikan dengan potensi yang ada. Banggar mengingatkan Pemkab Sidoarjo untuk tidak mengejar serapan anggaran semata, tetapi lebih penting untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Doc : Siska Prestiwati

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Basah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



peningkatan PAD jangan sampai dilakukan dengan menambah beban masyarakat secara berlebihan. Target pendapatan harus realistis dengan mempertimbangkan capaian sampai semester berjalan. Dengan begitu, perubahan APBD tidak hanya menghasilkan angka target yang tinggi, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dari sisi realisasinya. Belanja Ikut Dikurangi Tidak hanya pendapatan, belanja daerah juga mengalami penyesuaian. Belanja daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp 5.716.031.361.985. Setelah perubahan, angkanya menjadi Rp 5.613.244.134.023. Artinya, belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp 102.787.227.962 atau sekitar 1,80 persen. “DPRD meminta penurunan anggaran tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, pemerintah diminta melakukan penyesuaian agar anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan kepada program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Kusumo. Program yang tidak lagi relevan atau memiliki tingkat serapan rendah perlu dievaluasi. Anggaran yang tidak terserap juga harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebutuhan perubahan APBD. DPRD meminta belanja daerah diarahkan kepada program yang benar-benar prioritas dan mendukung pencapaian target dalam RPJMD maupun RKPD Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Pusat & Daerah Kemampuan fiskal daerah juga harus menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai program yang dimasukkan dalam perubahan APBD justru tidak dapat diselesaikan karena keterbatasan waktu maupun anggaran. Pembiayaan Juga Turun Pada sisi pembiayaan, APBD 2026 sebelum perubahan tercatat sebesar Rp 675.713.000.000. Setelah perubahan, pembiayaan menjadi Rp 656.368.498.282. Dengan demikian, pembiayaan daerah turun sebesar Rp 19.344.501.718 atau sekitar 2,86 persen. Banggar menyampaikan hasil pembahasan antara DPRD dan TAPD menunjukkan tidak adanya kenaikan pada sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Penyesuaian yang dilakukan justru mengarah pada pengurangan sesuai hasil evaluasi dan kondisi keuangan daerah. Infrastruktur Jadi Perhatian Salah satu perhatian utama DPRD dalam perubahan APBD 2026 adalah belanja modal. DPRD meminta belanja modal lebih banyak diarahkan untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang rusak dan mendesak. Fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, drainase, pengendalian banjir hingga sarana pelayanan publik disebut menjadi sektor yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut Banggar, infrastruktur dasar memiliki hubungan langsung dengan kualitas pelayanan masyarakat. Karena itu, pembangunan maupun rehabilitasi tidak boleh hanya berdasarkan usulan, tetapi harus mengacu pada tingkat urgensi dan kondisi di lapangan. DPRD juga meminta Pemkab melakukan evaluasi terhadap realisasi belanja operasi tahun anggaran 2025 dan 2026 hingga semester berjalan. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi anggaran yang tidak terserap, berlebih atau sudah tidak relevan. Hasil evaluasi kemudian dapat menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan anggaran perubahan. Setiap perubahan alokasi program dan kegiatan juga harus berdasarkan data valid, kebutuhan riil dan capaian kinerja. DPRD mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membuat kegiatan baru yang berpotensi tidak selesai sampai akhir tahun anggaran. Pengadaan Diminta Tak Menumpuk Persoalan pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian Banggar. Pemkab Sidoarjo diminta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pengadaan. Pengawasan tidak hanya dilakukan dari sisi administrasi, tetapi juga mencakup proses pemilihan penyedia, kontrak, progres fisik hingga pembayaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan. DPRD tidak ingin kegiatan yang sudah dianggarkan justru baru dikerjakan menjelang akhir tahun sehingga berisiko tidak selesai. Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah diminta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai jadwal. Jika terdapat hambatan, pemerintah diminta segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah penyelesaian. Delapan Rekomendasi DPRD Dalam rapat paripurna tersebut, Banggar menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemkab Sidoarjo. Pertama, pemerintah diminta memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan nasional, provinsi dan daerah, mulai RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RPJMD Kabupaten Sidoarjo, RKPD hingga dokumen perencanaan lainnya. Pantai & Kepulauan Kedua, pendapatan daerah harus disusun realistis berdasarkan potensi dan capaian riil sampai semester berjalan. Ketiga, belanja daerah harus diarahkan kepada program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Keempat, belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang rusak dan mendesak. Kelima, Pemkab diminta mengevaluasi realisasi belanja operasi tahun 2025 dan 2026 sampai semester berjalan. Keenam, setiap perubahan alokasi program dan kegiatan harus didasarkan pada data valid, kebutuhan riil dan capaian kinerja. Ketujuh, pemerintah daerah diminta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pengadaan, mulai administrasi hingga pembayaran. Kedelapan, seluruh rekomendasi Banggar harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Banggar pada akhirnya menyatakan dapat menerima rancangan perubahan KUA dan PPAS 2026 dengan sejumlah catatan tersebut. Subandi : Jadi Pijakan Pembangunan Bupati Sidoarjo Subandi mengapresiasi sinergi DPRD dan TAPD dalam menyelesaikan pembahasan rancangan perubahan KUA dan PPAS 2026. Menurut Subandi, kesepakatan tersebut menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal. “Kesepakatan ini menjadi pijakan penting agar pelaksanaan pembangunan tetap akuntabel dan sesuai kemampuan fiskal daerah. Seluruh catatan serta rekomendasi dari Banggar akan segera kami tindak lanjuti agar manfaatnya langsung dirasakan oleh warga Sidoarjo,” tandas Subandi. Dengan disepakatinya perubahan KUA dan PPAS melalui rapat paripurna, tahapan penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026 selanjutnya dapat dilanjutkan. Pemerintah Pusat & Daerah DPRD menegaskan perubahan anggaran bukan sekadar mengubah angka dalam dokumen APBD. Lebih dari itu, perubahan tersebut harus memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan persoalan daerah yang paling mendesak. Di tengah penurunan pendapatan, belanja dan pembiayaan, pemerintah daerah dituntut semakin selektif menentukan prioritas. Pelayanan dasar, infrastruktur, pengendalian banjir, pendidikan, kesehatan hingga penguatan ketahanan pangan dan energi menjadi sektor yang harus tetap dijaga. Dengan pengawasan DPRD dan pelaksanaan yang disiplin dari Pemkab, perubahan APBD 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan warga Sidoarjo